

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Thailand merupakan salah satu negara di antara negara-negara di kawasan Asia tenggara. Jika dilihat secara geografis, kerajaan Thailand berada pada benua benua Australia dan daratan utama Tiongkok. Kondisi geografis yang seperti ini, menjadikan kerajaan Thailand berada di posisi strategis yang dimana mudah dijangkau sehingga terdapat kegiatan perdagangan dan penyebaran agama. Agama Islam salah satu yang memasuki Thailand. Di Thailand Selatan, umat Muslim dikenal sebagai Muslim Patani karena menempati provinsi Patani yang dimana penghuninya sebagian besar beragama Islam. Provinsi Patani berdekatan dengan Negara Malaysia wilayah perbatasan (sempadan) selatan Thailand yang dikenal dengan Nama Changwad Chaiden Pak Thai banyak dihuni oleh komunitas Muslim keturunan Melayu. Wilayah tersebut terdiri dari empat provinsi yaitu Yala, Narathiwat, Patani dan Satun yang dimana setiap provinsi tersebut memiliki karakter yang kuat dibandingkan dengan masyarakat Thai pada umumnya. Hal inilah yang mengakibatkan perbedaan agama, kepercayaan, adat istiadat, bahasa, dan adat hidup keseharian. (Yuniarto P. R., 2005)

Patani memiliki peran penting dalam Islamisasi dan pertumbuhan perdagangan dan menjadi entrepot dalam perniagaan yang dimana menjual hasil bumi berupa rempah-rempah yang ditukar tekstil dengan Cina. Oleh karena itu, penyebaran Islam banyak dilakukan oleh pedagang Islam Cina kemudian dilanjutkan oleh Arab di Patani. Adanya penyebaran Islam dan kontak-kontak perdagangan yang begitu luas menyebabkan Patani menjadi kerajaan yang makmur. Pada masa inilah Patani mempunyai pengaruh dalam bidang politik dan daerah komersial (Yuniarto P. R., 2004). Namun, pada abad ke 17, Patani mengalami kemunduran karena rajanya wafat. Kekacauan politik di dalam internal kerajaan semakin tidak dapat dibendung. Perebutan kekuasaan terjadi yang mengakibatkan kekerasan dan perang antar saudara. Karena ketidakstabilan politik ini, menjadi peluang bagi kerajaan Siam (Thailand) yang dimana juga memiliki pengaruh besar dalam dalam peradaban serta kebudayaan dan mampu dengan mudah mengalahkan kerajaan Patani. Siam akhirnya mampu menguasai wilayah Patani.

Sejak kemenangan dan kekuasaan kerajaan Siam, mereka membuat pembentukan Negara yang menjadikan Thailand mencoba untuk membuat suatu komunitas politik melalui konsep

asimilasi yang dimana seluruh rakyat yang berada dalam kawasan Siam (Thailand) harus diasimilasikan ke dalam satu kesatuan bangsa yaitu Siam atau Thailand. Asimilasi Patani ke dalam Siam, tentu saja terdapat perubahan struktur sosial masyarakat. Muslim Patani yang semulanya mayoritas menjadi minoritas di bawah pemerintahan Siam. Sehingga munculah kebijakan asimilasi budaya. Atas dicetuskannya hal tersebut mengakibatkan reaksi negatif bagi Patani karena menimbulkan persoalan entitas budaya politik, agama yang membuat Thailand menjadi Negara majemuk. Kedudukan patani sebagai minoritas menjadikan posisinya tersubordinasi oleh budaya Thai yang mayoritas. Seperti yang diketahui bahwa agama budha menjadi mayoritas di sana karena merupakan agama resmi di Thailand. Karena perbedaan nilai, budaya, agama, bahasa, identitas yang fundamental sehingga sulit terasimilasikan. Sebagai loyalitas atas kehilangan agam, Muslim memperkuat dalam merespon non- *Thaicization* (Thaisisasi) atau anti-siam.

Kebijakan asimilasi budaya adalah bentuk nyata dari penghapusan identitas Islam dari aspek budaya, bahasa. Pemerintah Thailand menganggap Muslim Patani sebagai komunitas Islam yang sporadis Peristiwa kekerasan sering diberitakan oleh media masa yang dimana menimbulkan banyak korban karna aksi saling membalas dendam. Di dalam kebijakan tersebut terdapat larangan menggunakan bahasa Islam. Bahkan Islam disebut dengan kriminal dan sangat berbahaya. Stigma seperti ini dibentuk untuk mendukung asimilasi kebudayaan (Ekawat, 2019). Bahkan Islam dijuluki *khaek*, yang berarti tamu atau pendatang oleh pemerintah. Hal tersebut sudah jelas bagaimana perlakuan pemerintah yang begitu diskriminasi (Kusuma, 2016).

Asimilasi budaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui pendidikan, sekolah, hukum, politik, dan yang paling utama melalui militer. Pemerintah mempunyai dasar yaitu ideologi “*nation, king, and religion.*” Tiga pilar tersebut merupakan bentuk dari semangat baru pemerintah Thailand untuk mencapai tujuan bangsa yang besar. Dengan adanya asimilasi menyebabkan pergeseran kedudukan hukum Islam menjadi hukum sipil Thailand Pada 1940, ditetapkannya cara berpakaian ketika sekolah dan mewajibkan mengadopsi nama Thai jika seorang Muslim ingin memasuki sekolah negeri. Terdapat larangan lain yaitu melarang penggunaan bahasa malay di sekolah serta menghapus ajara nilai Islam (Sodiqin, 2016). Kondisi pluralitas masyarakat yang berusaha di seragamkan mengandung potensi dan ancaman bagi terurainya ikatan kesatuan dan keutuhan dalam negara bangsa Thailand itu sendiri.

Pemaksaan asimilasi budaya ini mengakibatkan Patani mengalami *culture shock*. Perubahan sosial yang seperti ini membawa pengaruh buruk terhadap Muslim Patani dan terus menerus menerima tekanan untuk mengganti identitas secara paksa. Adanya asimilasi budaya mempengaruhi peta yurisdiksi hukum Islam yang dimana sudah diterapkan oleh masyarakat Patani. Selain itu, terdapat pembatasan kewenangan penagakan hukumnya dan menjadikan kehidupan politik serta hukum terbelenggu oleh dalam ketidakbebasan karena kebijakan asimilasi budaya. Berbagai usaha telah dilakukan Patani dalam mempertahankan wilayahnya hingga terbentuk organisasi serta pergerakan sebagai bentuk bahwa Patani ingin kebebasan beragama dan berbudaya tanpa di bawah tekanan pemerintah sehingga mereka mampu beraktivitas selayaknya (Ekawat, 2019).

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, diketahui bahwa budaya merupakan suatu hal yang penting. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh beberapa permasalahan yang dapat diambil yaitu, Siapa saja kelompok yang melakukan perlawanan kebijakan asimilasi terhadap pemerintah Thailand?

C. Kerangka Berfikir

Untuk menganalisa materi ini agar mudah dipahami maka penelitian menggunakan kerangka berfikir yang dimana terdiri dari satu teori dan satu konsep. Teori yang akan digunakan adalah teori Deprivasi Relatif (Ted Robert Gurr) dalam menganalisa penolakan Patani terhadap kebijakan pemerintah Thailand Selatan.

Teori Deprivasi Relatif (Ted Robert Gurr)

Dalam buku *why men rebel* (ted robert gurr) konflik yang terjadi di Thailand terdapat banyak faktor antara lain seperti identitas, agama, dan ketidaksetaraan yang tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan diskriminasi baik antar individu atau kelompok dan merasa tidak puas. Ketidakpuasan memicu adanya potensi aksi kekerasan. Terdapat tiga faktor yang mendasari adanya potensi kekerasan politik dan kekerasan aktual yaitu justifikasi normatif kekerasan, justifikasi kemanfaatan kekerasan, keseimbangan sumber daya koersif dan institusional pemberontakan pemerintah/Negara. Kekerasan politik bisa dikatakan sebagai "pemaksaan", penggunaan atau ancaman kekerasan oleh pihak atau lembaga mana pun untuk mencapai tujuan di dalam atau di luar politik. Peserta politik kekerasan dapat menilainya sebagai sarana untuk mengekspresikan tuntutan politik atau menentang kebijakan yang tidak diinginkan.

Kekerasan terbatas juga bias berguna bagi para penguasa dan untuk sistem politik pada umumnya, khususnya sebagai ekspresi malaise sosial ketika cara lain untuk membuat tuntutan tidak memadai.

Ted Robert Gurr menyatakan bahwa terjadinya kekerasan dipicu oleh Deprivasi Relatif yang diterima atau dialami oleh masyarakat maupun individu. Ted Robert Gurr merumuskan deprivasi relatif sebagai akibat dari “*a discrepancy between the “ought” and the “is” of collective value satisfaction*”. *Ought* digambarkan sebagai ekspektasi, *is* yang menjelaskan gambaran masa kini dan fakta peristiwa yang terjadi, Gurr mendefinisikan deprivasi relative bahwa individu memiliki jarak negatif antara nilai ekspektasi dan kapabilitas. Nilai ekspektasi merupakan harapan individu tentang kualitas hidup yang mampu untuk dinikmati. Sedangkan nilai kapabilitas adalah mempercayai bahwa mereka mampu mencapai harapan tersebut. Dalam hal ini, nilai yang dimaksud oleh Gurr merupakan sebuah kejadian, objek, kondisi yang dimana diperjuangkan oleh individu atau kelompok yang berdasarkan kepada sebab fenomena seperti pengalaman masa lalu dan standar harapan yang sudah disepakati oleh kelompok.

Dalam bukunya, Gurr mendefinisikan perbedaan teori deprivasi menjadi tiga model. Pertama, *decremental deprivation* terjadi jika harapan masih sama akan tetapi kemampuan menurun. Hal ini terjadi ketika seseorang ingin mendapatkan keinginannya akan tetapi kehilangan lah yang dia dapatkan. Sehingga muncul beragam nilai seperti depresi, perasaan tidak aman, dan kemunduran oportunitas. Kedua, *aspirational deprivation* yang dimana keinginan kelompok tidak berubah namun harapan kelompok meningkat. Nilai ekspektasi meningkan disebabkan kelompok lain sedang mengalami perkembangan. Ketiga, *progressive deprivation* kemampuan menurun sementara harapan meningkat. Secara umum, deprivasi relative terjadi jika seseorang mengalami ketidakadilan akibat kesenjangan harapan dan tidak sesuai dengan ekspektasi (Kholil, 2019).

Kekerasan politik terjadi karena masyarakat amarah ketika kondisi praktis dan keadaan budaya yang memicu agregasi terhadap politik (Anang Fajrul Ukhwaluddin, 2021). Gurr mengembangkan teori ini yang didasarkan oleh psikologi terhadap kekerasan politik didefinisikan sebagai “*semua serangan kolektif dalam suatu komunitas politik terhadap rejim politik, para aktor politiknya, termasuk kelompok-kelompok politik yang bersifat bersaing, para pejabat atau kebijakan-kebijakannya. Konsep ini menggambarkan adanya seperangkat peristiwa, penggunaan, atau ancaman penggunaan kekerasan secara bersama. Konsep ini termasuk revolusi, termasuk perang Gerilya, kudeta, pemberontakan dan kerusuhan.*” Secara khusus, Gurr menjelaskan bentuk

dari kekerasan politik yaitu, kekacauan, persengkongkolan, dan perang saudara. Arti revolusi di dalam buku Gurr termasuk dalam perang saudara (Siahaan, 1999).

Hal ini sesuai dengan penolakan Patani atas kebijakan pemerintah Thailand karena ketidakadilan struktur sosial. Struktur sosial merupakan konsekuensi dari ketimpangan distribusi kekuasaan, kekayaan, dan prestise yang mengakibatkan perbedaan kepentingan. Kekuasaan tersebut meliputi penguasaan sumber daya material. Apabila Patani memberontak, tidak menjadikan Patani sebagai pembuat kericuhan. Penolakan dan pemberontakan ini dimulai ketika pemerintah Thailand menerapkan kebijakan asimilasi yang dimana ingin menjadikan Thailand hanya mempunyai satu identitas. Agama Islam yang termasuk sebagai agama minoritas terkena dampak dari kebijakan tersebut. Patani dipaksa menjadi bagian dari agama Budha yang menjadi mayoritas. Patani melakukan pemberontak karena ketidakadilan serta deskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand. Ketidakpuasaan yang dialami Muslim Patani atas kebijakan tersebut memicu adanya aksi kekerasan oleh pemerintah Thailand. Aksi kekerasan bisa dikatakan juga sebagai bentuk pemaksaan yang dimana seperti pemaksaan kebijakan asimilasi terhadap Muslim Patani untuk mencapai kepentingan tujuan yaitu Thailand hanya memiliki satu identitas.

Ted Robert Gurr mendefinisikan teori Deprivasi Relatif bahwa individu memiliki jarak negatif antara nilai ekspektasi dan kapabilitas. Definisi ini sesuai akan keadaan Muslim Patani. Muslim Patani memiliki nilai ekspektasi yang dimana mempunyai harapan identitas mereka tidak dihilangkan dan bebas melakukan aktivitas sesuai nilai-nilai serta budaya mereka tetapi terhalang karena kebijakan asimilasi. Sedangkan dalam nilai kapabilitas, umat Muslim Patani percaya dapat mencapai harapan mereka untuk mempertahankan identitas mereka dengan melakukan perlawanan terhadap pemerintah Thailand atas kebijakan asimilasi. Apa yang dimaksud oleh Gurr sesuai dengan keadaan yang sedang dialami oleh Muslim Patani, mereka berjuang untuk mempertahankan identitas yang berdasarkan kepada sebab fenomena yang sudah terjadi. Namun, perjuangan yang dilakukan oleh Muslim Patani direspon oleh pemerintah Thailand dengan kekerasan yang menimbulkan kekacauan, persengkongkolan, dan perang saudara.

D. Hipotesa

Semenjak dilaksanakan kebijakan asimilasi budaya oleh pemerintah Thailand, maka timbul sentiment-sentiment etnis, budaya dan agama di kalangan Muslim Melayu-Patani, sehingga mendorong reaksi, resistensi, dan solidaritas sesama muslim-Melayu untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Bentuk perlawanan mulai dari pemogokan sipil, seperti tidak mengikuti sistem pendidikan dengan tetap menerapkan sistem tradisional di pondok pesantren sampai penggunaan bahasa Rumi (Melayu) di lembaga pendidikan hingga pemberontakan bersenjata. Selain itu, lahirlah kelompok-kelompok pergerakan perlawanan etnis Melayu yang ada di Patani, yaitu BRN, PULO, BNPP. Setiap kelompok pergerakan perlawanan memiliki tujuan dan cara masing - masing untuk melawan kebijakan pemerintah Thailand.

E. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian yang berjudul “Perlawanan Masyarakat Patani Terhadap Kebijakan Pemerintah Thailand” peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah: Mengetahui Siapa saja kelompok yang melakukan perlawanan kebijakan asimilasi terhadap pemerintah Thailand.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mana metode penelitian yang digunakan dengan menganalisa study pustaka terhadap subjek yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan tentu berkaitan dengan adanya study kasus dari adanya kebijakan asimilasi budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand dalam memperkuat kebudayaan Budha *Thaicization* (Thaisisasi) yang dimana Pemerintah Thailand ingin menjadikan Thailand mempunyai satu identitas yaitu Budha. Penelitian kualitatif sendiri berdefinisi dengan adanya metode yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan hasil deskriptif yang berbentuk kata-kata, dengan secara tertulis maupun secara lisan yang bisa juga dilakukan dengan mewawancarai seseorang yang ahli dalam bidang tersebut (Yusuf, 2004). Untuk melengkapi data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisa kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial dengan menggunakan teknik pengumpulan data *library research* dengan memanfaatkan data-data sekunder yang dikumpulkan datanya dari perpustakaan, buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan majalah.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penulisan, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Adapun fokus penelitian yaitu rentang waktu tahun 2004-2017 yang dimana Muslim Patani sedang gencarnya dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah Thailand.

H. Rencana Sistematika

Ada pun sistematika dari penulisan antara lain sebagai berikut :

Bab I, pada bab ini terdapat pendahuluan sebagai dasar dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan rencana sistematika.

Bab II, bab ini akan membahas tentang sejarah berkembangnya umat Islam dan awal mulamunculnya kebijakan masyarakat.

Bab III, bab ini berisi perlawanan yang dilakukan Patani dan dampak dari kebijakan asimilasi pemerintah Thailand.

Bab IV, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.